



Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan

The Effectiveness Of Management Of Village Fund Allocation In 2017 In The Effort Of Improving Community Welfare In Hessa Village, Perlompongan, Air Batu District, Asahan Regency

Dian Nur Utama Saragih, Abdul Kadir, & Walid Musthafa
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Abstrak

Kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang penting untuk diperhatikan peningkatannya karena merupakan cita-cita dari penyelenggaraan negara, hal ini tentu menjadi tanggung jawab besar khususnya bagi Pemerintah Desa karena memiliki wewenang yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya ialah memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya kepada tiap Desa yang ada dimasing-masing Kabupaten, salah satu yang memperolehnya ialah Desa Hessa Perlompongan yang berada di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yaitu pada tahun 2017. Pengelolaan ADD untuk tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan telah diatur dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan menjadikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan dari pengelolannya. Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk melakukan penilitan dengan judul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk mengukur keefektivan dari pengelolaan ADD tersebut penulis mencoba menyesuaikan penelitian ini dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Duncan yaitu: Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dalam penelitian ini dapat digambarkan bahwa pengelolaan ADD tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan masih belum berhasil menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dikarenakan masih adanya kendala yang menghalangi pencapaian tujuan tersebut, misalnya seperti jumlah dana yang disalurkan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa sangat terbatas dan banyak kebutuhan internal Pemerintah Desa yang dipenuhi dengan menggunakan ADD sehingga tidak dana yang disalurkan belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuklah masyarakat yang berprofesi sebagaimana tercover dalam ADD seperti guru mengaji, bilal mayit, penggali kubur dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kesejahteraan.

Abstract

Welfare society to be important to note the increase because it is the aspiration of the implementation of the country, this would be a great responsibility, especially for the Government of the Village because it has the authority of the area in the implementation of the government in Indonesian. One of the efforts made by the Government in improving the welfare of society is to provide Allocation of Village Funds every year to each of the respectively the one who is the Hessa Perlompongan in the Air Batu of the Asahan regency of North Sumatera, which is in 2017. The management Allocation of Village Funds for the year 2017 at the Hessa Perlompongan have been set up in a regulation of the Asahan No. 8 Year 2017 Guidelines for Management Allocation Fund of the year 2017 and make improving the welfare of society as one of the goals of its management. Based on this is a writer interested in doing research with the title of the Effectiveness Allocation Fund of the year 2017 In The Improvement of Public Welfare Society in the village of Hessa Perlompongan the Air Batu of the Asahan Regency with using the method of research a qualitative. To measure effectiveness of the management Allocation of Village Funds is a writer trying to fit this research by using the theory put forward by Duncan, namely: Achieving the goal, integration and adaptation. In this study can be described that the management Allocation of Village Funds in 2017 at the Hessa Perlompongan is still not succeeded in creating the improvement of public welfare because there are still problems that impede the achievement of these objectives, such as the amount of funds disbursed from the Government of the to the very limited and a lot of the needs of internal Government of which are filled with the use of Allocation of Village Funds so that no funds are distributed not enough to improve the welfare of society, including the community who works as covered in the Allocation of Village Funds as tutor, the dead bilal, the gravediggers and so forth.

Keywords: Effectiveness, Management Of The Allocation Of Funds, Welfare.

How to Cite: Dian Nur Utama Saragih, Abdul Kadir, & Walid Musthafa. (2022) Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 1(2) 2022: 66-75,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesejahteraan menjadi hal yang sangat diprioritaskan di Indonesia, hal ini terbukti karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini pemerintah di tingkat desa tentunya memiliki wewenang yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah desa merupakan unsur dari pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Membahas mengenai kesejahteraan masyarakat desa, tentunya juga tidak terlepas dari pengelolaan dana yang ada di suatu Desa, dalam hal ini ialah pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam rangka pengelolaan terkait Alokasi Dana Desa, maka perlu dipersiapkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan dalam proses penyelenggaraannya mengingat bahwa dana yang dikelola tersebut memiliki jumlah yang cukup besar. Sebagaimana data yang diperoleh dalam situs desa- membangun.blogspot.co.id menyatakan bahwa Jumlah Alokasi Dana Desa tahun 2017 yang telah ditetapkan Pemerintah dalam RAPBN tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 60 Triliyun. Dengan besarnya anggaran Alokasi Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang ada didaerah, dalam hal ini ialah Desa Hessa Perlompongan yang menjadi salah satu penerima ADD tahun 2017 diantara 117 Desa yang ada didaerah Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. (Jaya dkk, 2020; Tambunan dkk, 2020).

Desa Hessa Perlompongan merupakan wilayah yang terdiri dari empat Dusun dengan jumlah masyarakat yang tercatat di Balai Desa sebanyak 5086 orang, sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani dan wiraswasta namun banyak juga yang bekerja sebagai buruh dan lain sebagainya. Tidak ada hal yang begitu menarik perhatian dari sudut pandang mata pencaharian masyarakat di Desa Hessa Perlompongan, dikarenakan Desa ini berlokasi dipinggiran jalan lintas Sumatera sehingga memungkinkan letak geografis tersebut memberikan pengaruh bagi masyarakat Desa Hessa Perlompongan untuk memiliki mata pencaharian yang beragam. (Pratama dkk, 2021; Risa dkk, 2021).

Sehubungan dengan hal ini, sekilas penulis memberi pandangan berdasarkan pengamatan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan. Hingga saat ini di Desa Hessa Perlompongan baru hanya menunjukkan peningkatan pada sektor infrastruktur seperti pengecoran jalan, perbaikan saluran parit dan lain sebagainya, walaupun hal tersebut bisa dinilai sebagai wujud kemajuan bagi Desa, akan tetapi pada aspek kesejahteraan masyarakat Desa belum menunjukkan tanda-tanda terhadap peningkatannya. Hal tersebut dapat diperhatikan dengan melihat tingkat perekonomian yang merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan masyarakat Desa, sejak empat tahun belakangan ini belum ada terlihat perubahan konkrit yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Hessa Perlompongan, hal ini bisa dinilai dengan mengamati keadaan perekonomian masyarakat Desa yang masih tetap sama seperti empat tahun sebelumnya. Dapat disederhanakan bahwa walaupun saat ini sudah ada dana yang di alokasikan kesetiap desa, Desa Hessa Perlompongan masih belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan pada kesejahteraan masyarakatnya. (Jamaluddin dkk, 2018; Saraan dkk, 2019).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini diturunkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan sudah efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor kendala/penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas dari pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Hessa Perlompongan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala/penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Sebagai salah satu syarat dan kewajiban dalam menyelesaikan studi S1 untuk mencapai gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi Pemerintah Desa Hessa Perlompongan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk menambah wawasan bagi peneliti sekaligus mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik.

LANDASAN TEORI

Efektivitas berasal dari kata efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif memiliki arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) ataupun dapat membawa hasil. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Sondang P. Siagian 2001 : 4). (Sinaga dkk, 2018; Hartanto, 2020).

Ukuran Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas suatu program bukanlah hal yang mudah, karena tingkat efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai dan menginterpretasikannya. Richard M. Steers (2005 : 53) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" menyatakan teori mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.
2. Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang mengatur tentang pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (Setiawan dkk, 2021; Sembiring, 2014).

Pengelolaan ADD di Desa Hessa Perlompongan haruslah berlandaskan prinsip dan asas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2017. Adapun Prinsip dan asas pengelolaan ADD tersebut ialah:

1. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dan seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. ADD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
3. ADD digunakan secara hemat, terarah, terkendali dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Teori Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial/masyarakat bisa didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 1).

Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat kesejahteraan akan digunakan beberapa indikator yang telah digunakan oleh BKKBN, adapun beberapa indikator tersebut ialah sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sejahtera
Keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I
2. Keluarga Sejahtera I
 1. Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing
 2. Makan 2 (dua) kali sehari atau lebih
 3. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan
 4. Lantai rumah bukan dari tanah
 5. Jika anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan.
3. Keluarga Sejahtera II
 1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing
 2. Minimal seminggu sekali keluarga tersebut menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk
 3. Memperoleh pakaian baru dalam setahun terakhir
 4. Luas lantai tiap penghuni rumah satu 8 m²
 5. Anggota keluarga sehat dalam keadaan tiga bulan terakhir, sehingga dapat menjalankan fungsi masing-masing
 6. Keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap
 7. Bisa baca tulis latin bagi anggota keluarga dewasa yang berumur 10-60 tahun
 8. Seluruh anak yang berumur 7-15 tahun bersekolah pada saat ini
 9. Anak hidup dua atau lebih dan saat ini masih memakai alat kontrasepsi
4. Keluarga Sejahtera III
 1. Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama
 2. Keluarga mempunyai tabungan
 3. Keluarga biasanya makan bersama minimal 1 (satu) kali dalam sehari
 4. Turut serta dalam kegiatan masyarakat
 5. Keluarga mengadakan rekreasi bersama minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
 6. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/televisi/majalah
 7. Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi
5. Keluarga Sejahtera III Plus
 1. Memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela untuk kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi
 2. Aktif sebagai pengurus yayasan/instansi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum dan menafsirkan makna data (Jamaluddin Ahmad, 2015 : 52).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, pada Februari 2018 - Maret 2018 Informan Penelitian Informan Kunci Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui secara pokok data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Hessa Perlompongan Bapak Franki Suwito Lubis.

Informan Utama

Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam hal yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pemerintahan Desa Hessa Perlompongan Bapak Agus Setiawan.

Informan Tambahan

Informan Tambahan yaitu mereka yang mengetahui informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam hal yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Perangkat Desa dan masyarakat Desa Hessa Perlompongan. (Sirait, R., Sinaga, R., dkk 2021)

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Observasi
2. Wawancara Mendalam
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah seperti Miles and Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: Reduksi, Penyajian dan Penarikan Kesimpulan (Jamaluddin Ahmad, 2015 : 212).

Uji Keabsahan Data (Valid/ Realibel)

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, terutama memeriksa informasi yang didapatkan dilapangan, berdasarkan berbagai dokumen hasil kegiatan perencanaan dan data-data lapangan. Uji kepercayaan dilakukan dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif dan menggunakan bahan referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Alokasi Dana Desa pun tentunya memiliki sasaran yang telah ditetapkan sebagai tujuan dari pengelolaannya. Untuk pengelolaan ADD tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan, salah satu tujuannya yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut peneliti mencoba mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam wawancara dengan informan untuk menjawab persoalan yang ada pada penelitian ini. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan pencapaian tujuan dari pengelolaan ADD tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan ialah: Apakah pengelolaan ADD pada tahun 2017 sudah berhasil menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Hessa Perlompongan?

Ibu Miswati (Guru Mengaji) dengan pertanyaan yang sama mengatakan: "Bisa dikatakan ada peningkatan, tapi belum sepenuhnya berhasil, karena pada tahun 2017 itu pemerintahnya jalan ditempat dan datar-datar aja, tidak terasa kehadiran pemerintah desa dan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke peningkatan kesejahteraan pun tak ada dirasakan, jadi dampak yang dihasilkan pun masih sangat kecil, perlulah pemerintah Desa lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya termasuklah guru-guru mengaji yang menerima honor tersebut juga haruslah ditingkatkan, karena ini juga untuk kepentingan ilmu agama generasi muda di desa ini" (Kamis, 8 Maret 2018 di Rumah Informan).

Apa yang menjadi faktor-faktor kendala/penghambat pada proses pengelolaan ADD pada tahun 2017 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Hessa Perlompongan? Bapak Agus Setiawan (Kepala Seksi Pemerintahan) dengan pertanyaan yang sama mengatakan: "Sejauh tahun 2017 tidak ada kendala, semuanya lancar-lancar saja, hanya saja untuk pencairannya agak sedikit terhambat pada triwulan pertama, yang jadi masalahnya yaitu penyusunan draftnya yang terlambat, karena hal itu menjadi salah satu syarat untuk pencairan anggarannya, sedangkan untuk triwulan 2, triwulan 3 semuanya lancar sampai diakhir periode dan juga selama program yang tercover dalam APBDes tidak ada kendala. Untuk kendala dilapangan jugak tidak ada dalam pembangunan, sebab hal tersebut tidak tercover di dalam ADD sedangkan untuk pembangunan fisik kantor yang tercover dalam ADD juga tidak ada kendala, hanya saja pada saat pembangunan pelayanan kepada masyarakat agak sedikit terganggu, kalau untuk penyaluran dana-dana lainnya ya semua sesuai dengan yang direncanakan" (Senin, 5 Maret 2018 di Balai Desa).

2. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan integrasi dari pengelolaan ADD tahun 2017 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Hessa Perlompongan ialah:

Apa upaya konkrit yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa Hessa Perlompongan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Bapak Agus Setiawan (Kepala Seksi Pemerintahan) dengan pertanyaan yang sama mengatakan: "Sejauh ini yang masih bisa diupayakan yaitu peningkatan kesejahteraan untuk honor perangkat desa, karena honor tersebut tercover dalam ADD, Kepala Dusun Kepala Desa juga termasuk disitu dan juga BPD kemudian yang selanjutnya pembayaran honor- honor bantuan sosial desa, selain itu kita juga memberikan bantuan-bantuan kegiatan keagamaan seperti nasyid, kegiatan MTQ, membantu pembangunan rumah ibadah" (Senin, 5 Maret 2018 di Balai Desa).

Bapak Suganda (Wirausaha) dengan pertanyaan yang sama mengatakan: "Upaya yang dilakukan selama tahun 2017 cukup banyak, tinggal lagi kebanyakan dari upaya tersebut bukan berasal dari ADD, misalnya seperti pembagian raskin, melakukan bedah rumah, justru program yang ada diluar ADD tersebut cukup lebih memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat disini" (Jum'at, 9 Maret 2018 di Rumah Informan).

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan adaptasi dari pengelolaan ADD tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan ialah: Apakah dampak yang dihasilkan dari pengelolaan ADD pada tahun 2017 untuk masyarakat Desa Hessa Perlompongan? Bapak Franki Suwito Lubis (Kepala Desa) mengatakan: "Dampaknya bisa dikatakan cukup baik, karena misalnya seperti guru mengaji, penggali kubur, bilal mayit yang ada di Desa Hessa Perlompongan cukup terbantu pendapatannya walaupun tidak begitu banyak peningkatannya, karena anggarannya juga tidak begitu besar" (Rabu, 7 Maret 2018 di Balai Desa).

Ibu Miswati (Guru Mengaji) dengan pertanyaan yang sama mengatakan: "Kalau secara pribadi bisa dibilang dampaknya cukup membantulah, karena dapat bantuan honor mengaji itukan bisa membantu meringankan beban ekonomi dan meringankan beban suami juga, tapi kalau bisa ya ditambah lagilah karekan honornya pun sangat kecil dan bisa dibilang hampir tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan karena jika disetarakan dengan upah guru-guru umum ya masih terbilang jauh dibawahnya" (Kamis, 8 Maret 2018 di Rumah Informan).

Analisa Data

Dari penyajian data yang diuraikan diatas dapat di peroleh gambaran bahwa efektivitas dapat diukur dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Duncan, yaitu:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian yang dilakukan dengan wawancara mendalam kepada Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan Masyarakat Desa Hessa Perlompongan, maka faktor-faktor yang mempengaruhi belum efektifnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 dalam hal ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Belum Menjadi Prioritas Dalam Pengelolaan ADD Tahun 2017

Dalam ADD tahun 2017, kesejahteraan masyarakat masih belum dijadikan prioritas dalam pengelolaannya di Desa Hessa Perlompongan. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa Hessa Perlompongan lebih mengutamakan pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Hal ini dikemukakan oleh perangkat Desa Hessa Perlompongan sebab anggaran dalam Dana Desa lebih memadai dan lebih efektif untuk disalurkan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

2. Kurangnya Efisiensi Dalam Menggunakan Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa dapat digambarkan bahwa dengan keterbatasan dana yang tersedia, Pemerintah Desa Hessa Perlompongan masih bisa dikatakan belum mengarahkan penggunaan dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal itu dikarenakan anggaran yang ada di ADD tahun 2017 masih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan

internal Pemerintahan Desa misalnya seperti honor perangkat desa, kelengkapan inventaris kantor, renovasi kantor desa dan lain sebagainya.

3. Belum Sesuai Tujuan Yang Ditetapkan Dengan Kondisi Di Lapangan

Dengan adanya ADD pada tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan mestinya sudah cukup untuk bisa memperlihatkan hasil pada peningkatan kesejahteraan masyarakat jika memang pengelolaan ADD tersebut diarahkan kepada hal tersebut, namun pengelolaannya sampai saat ini belum memperlihatkan hasil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Hessa Perlompongan, hal ini dapat dilihat dari kondisi penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan datar dan terkesan masyarakat tidak begitu merasakan kehadiran pemerintah di lingkungannya sehingga bisa dideskripsikan bahwa pengelolaan ADD tahun 2017 tersebut belum berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan salah satunya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

4. Perlunya Inisiatif Dari Pemerintah Desa

Kurangnya inisiatif dari Pemerintah Desa untuk melaksanakan program dan kegiatan, bisa dikatakan sebagai penghalang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Pentingnya program dan pengadaan kegiatan-kegiatan dari Pemerintah Desa yang lebih menuntun masyarakat untuk mandiri, karena hal itu menjadi salah satu pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri. Melalui program dan kegiatan yang demikian itu tentu akan sangat membantu masyarakat Desa untuk bisa menambah wawasan sekaligus mengasah kemampuan yang dimiliki, dengan begitu masyarakat Desa menjadi lebih bermutu dan secara otomatis tentu hal tersebut akan berdampak dengan peningkatan kesejahteraannya.

SIMPULAN

Pengelolaan ADD tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan masih bisa dikatakan belum mencapai kesesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Hal tersebut dikarenakan masih adanya faktor-faktor kendala dan penghambat baik dari internal Pemerintah maupun eksternalnya yang belum bisa teratasi, misalnya seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat belum menjadi prioritas dalam pengelolaan ADD tahun 2017, belum sesuai tujuan yang telah ditetapkan dengan kondisi di lapangan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan masih belum efektif dalam menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan program yang sudah ditetapkan serta implementasi dari pengelolaan ADD tahun 2017 di Desa Hessa Perlompongan dapat disimpulkan bahwa masih belum efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dikarenakan kurangnya inovasi dari perangkat Desa dalam mengelola ADD pada tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Amelia, A., Sahabuddin, C., & Fitrah, N. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Wisata Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Wisata Bunga Anggrek Tondok Bakaru Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2), 125-134. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.689>
- Azmi, A., Isnaini, I., & Kusmanto, H. (2019). Efektivitas Peran Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 11-21
- Berutu, B., Nasution, M., & Kadir, A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 1-10
- Desa Tahun Anggaran 2017
desa-membangun.blogspot.co.id (diakses pada 22 November 2017).
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192-200. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Halawa, N. Kadir, A & Matondang, A (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 45-53
- Haluana'a, F.J. Nasution, I. & Batubara, B.M. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1) 2020: 46-52,
- Hartanto, D. (2020). Institusi Inklusif Primum Non Nocere Kesejahteraan Sosial. *PERSPEKTIF*, 9(2), 119-129. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3549>
- Jamaluddin, Y. Sumaryana, A. Rusli, B. & Buchari, R.A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 6 (1): 14-24.
- Jaya, I., Humaizi, H., & Achmad, N. (2020). Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. *PERSPEKTIF*, 9(2), 252-262. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3544>
- Khainuddin, K., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Rawat Inap Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 22-31
- Khairunnisa, A., Hasibuan, E., & Novri, N. (2021). Representasi Nilai - Nilai Karakter Masyarakat Minangkabau pada Film Surau dan Silek. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2), 143-150. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.710>
- Lestari, A. Muda, I. & Dewi, R. (2019). Sistem Pengelolaan Arsip Pada Biro Sekretariat Dan Umum Kantor Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 39-44,
- Manik, A., Kusmanto, H., & Lubis, M. (2019). Analisis Reliabilitas dan Responsivitas dalam Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 65-74
- Mulia, B., Ritonga, S., & Nasution, I. (2021). Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 12-18. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.509>
- Nasution, A., Mardiana, S., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kaitannya dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Binjai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 52-64
- Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Novriansyah, M., Mukhlis, M., Budiono, P., & Poniasih, N. (2021). Kolaborasi Pemerintah Kampung dengan Perusahaan Tapioka Dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Hasil Pengelolaan Singkong. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2), 81-91. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.673>
- Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Poedjianto, A., Warjio, W., & Isnaini, I. (2019). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 43-51.
- Pratama, A., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *PERSPEKTIF*, 10(2), 371-382. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509>
- Rambe, N., Muda, I., & Matondang, A. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Memberdayakan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 73-80. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.482>
- Rejeki, R., Muda, I., & Batubara, B. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 59-64. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.481>
- Rejeki, R., Muda, I., & Batubara, B. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2), 151-155. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.715>
- Risa, H., Badaruddin, B., & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *PERSPEKTIF*, 10(2), 739-753. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207>
- Roberto, S.A., Kadir, A. & Angelia, N. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 32-38,
- Safi'i. Kadir, A. & Lubis, Y.A (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 160-169,
- Samosir, Y., Warjio, W., Purba, A., & Isnaini, I. (2021). Analisis Kinerja Pegawai Di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat (Bp-Paud Dan Dikmas) Sumatera Utara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 90-98. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.725>
- Santifa, M., Warjio, W., Harahap, D., & Isnaini, I. (2019). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Mawar Sejadi di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 89-98
- Saraan, M., Suwitri, S., & Yuniningsih, A. (2019). Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9(2), 151-157. doi:<https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2800>
- Sembiring M.W., (2014). Persepsi Konstituen terhadap Anggota DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 2 (2): 134-147
- Setiawan, E., Nurwati, R., & Apsari, N. (2021). Kesejahteraan Anak Adopsi Usia Prasekolah (3-5 Tahun). *PERSPEKTIF*, 10(2), 609-615. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4893>
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinaga, A., Kadir, A., & Mardiana, S. (2019). Peranan Motivasi Kerja Dalam Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjung Balai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 32-42
- Sinaga, M. Tarigan, U. Dewi, R. (2018). Peranan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *PERSPEKTIF*, 7 (2): 46-49.
- Sirait, R., Sinaga, R., & Lubis, M. (2021). Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Terhadap Kondisi Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 44-56. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.524>
- Sirait, Y., Kadir, A., & Batubara, B. (2021). Efektivitas Rekrutmen Pegawai di SPBU Coco Pertamina Retail Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 53-58. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.515>
- Steers, Richard M. 2005. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Syafitri, U., Tarigan, U., & Batubara, B. (2021). Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print pada Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 19-26. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.436>
- Tambunan, B., Sihombing, M., & Harahap, R. (2020). Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *PERSPEKTIF*, 9(2), 439-446. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3942>
- Tanjung, M., Kusmanto, H., Warjio, W., & kadir, A. (2019). Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 82-88.

- Tarigan, D., Marbun, P., & Tarigan, E. (2020). PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2), 122-127. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v2i2.349>
- Turnip, H. Hendra, Y. & Matondang, A. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Kinerja Kantor Search and Rescue Medan dalam Pencarian Orang Hilang di Gunung Sibayak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1) 2020: 7-11,
- Undang-Undang:
www.gfpanjalu.com (diakses pada 23 Januari 2018).
www.kemejingnet.com (diakses pada 21 November 2017).
- Yolanda, H. Hendra, Y. & Matondang, A. (2020). Strategi Downward Communication Pimpinan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Di PT. Pelabuhan Indonesia I. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1) 2020: 1-6,
- Zakwani, K., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 75-81
- Zulianda, W. Muda, I. & Jamil, B. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Kurikulum untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di TK Dewantara Titi Kuning Kecamatan Medan Johor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1) 2020: 60-67,